

Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan dan Alih Fungsi Menjadi Perkebunan (Studi Kasus Perkara Register Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Plw)

Donal Alfari Pakpahan¹

¹Universitas Krisnadwipayana

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa tanah kawasan hutan dan alih fungsi menjadi perkebunan dihubungkan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 merupakan kajian yang berdasarkan pada landasan hukum atas penguasaan dan penggunaan tanah secara melawan hukum yang terjadi di Desa Segati, Kecamatan Langgam antara perusahaan swasta nasional melawan masyarakat adat dan masyarakat petani pendatang khusus datang untuk berkebun dan tinggal di sekitar kawasan hutan yang telah beralih fungsi. Penelitian menggunakan hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pembahasan penelitian ini adalah bahwa perampasan lahan perkebunan milik masyarakat dikategorikan ke dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tidak dinyatakan secara tersurat akan tetapi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kehutanan dan undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan serta *illegal logging* yang mengakibatkan berlakunya asas *lex specialis derogate legi generalis* atau peraturan khusus menyampingkan peraturan yang umum di areal konsesi PT. Nusa Wana Raya di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan tidak ada ditemukan warga masyarakat transmigrasi. Hasil penelitian ini dapat memperlihatkan bahwa aspek secara legalitas yang digunakan untuk penguasaan kawasan hutan oleh pihak perusahaan multi nasional adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi (sementara) PT. Nusa Wana Raya.

Kata Kunci: sengketa tanah, alih fungsi hutan, agraria.

ABSTRACT

*Settlement of land disputes in forest areas and conversion of functions to plantations is linked to Article 5 of Law Number 51 Prp. 1960 is a study based on the legal basis for unlawful control and use of land that occurred in Segati Village, Langgam District, between national private companies and indigenous peoples and immigrant farming communities who came to do gardening and live around forest areas that had changed functions. The research uses normative juridical law using a statutory approach. This research discusses that the expropriation of community-owned plantation land is categorized into Article 5 of Law Number 51 Prp. 1960 is not stated explicitly but is specifically regulated in Law Number 18 of 2014 concerning Forestry and the law on preventing and eradicating forest destruction and illegal logging which resulted in the application of the principle of *lex specialis derogate legi generalis* or special regulations overriding the general regulations in Indonesia. concession area of PT. Nusa Wana Raya in Segati Village, Langgam District, Pelalawan Regency, no transmigration community members were found. The results of this study can show that the legal aspect used for the control of forest areas by multi-national companies in the Transmigration Pattern (temporary) PT. Nusa Wana Raya.*

Keywords: land disputes, forest conversion, agrarian.

PENDAHULUAN

Konflik kepemilikan tanah kawasan hutan semakin hari semakin tinggi intensitasnya di mana dengan mudahnya masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat sehingga dengan mudah terprovokasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta yang hendak membuka kawasan hutan menjadi lahan perkebunan sawit dan perkebunan karet. Pelalawan adalah berasal dari kerajaan yang sudah berdiri sekitar abad ke 14 M yang berpuncak dari Kerajaan Pekantua, dibekas Kerajaan Pelalawan yang sekarang menjadi Kabupaten Pelalawan dan terdapat pula “Kerajaan Segati,” sekarang berada di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Kerajaan Segati ini telah tinggal dan hidup masyarakat adat yang turun-temurun yang dibuktikan dengan adanya makam leluhur dan orang tua mereka dan merupakan kawasan hutan yang dilalui Sungai Segati ini sangat subur yang ditanami karet, kelapa sawit dan tanaman lainnya untuk menopang hidup masyarakat adat dan pada masa inilah datang utusan Aceh untuk bersahabat, kemudian berkembang menyebarkan agama Islam. Dalam hal adat tetaplah mereka pertahankan oleh kelompok masyarakat yang berada di Desa Segati hingga sekarang.¹

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap yang ditunjuk dan atau oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pembatasan Perusakan Hutan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ditetapkan penguasaannya bagi Negara. Kawasan-kawasan hutan, seluruhnya merupakan wilayah-wilayah yang dalam *land use planning* telah akan ditetapkan penggunaannya di bidang kehutanan yang didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat Indonesia.²

Semenjak kehadiran PT Nusa Wana Raya di Desa Segati, Kecamatan Langgam tersebut telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan sehingga terjadi penindasan hak-hak masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan yang dialami masyarakat adat dan masyarakat petani pendatang hingga awal tahun 2012 di Desa Segati, Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan masyarakat adat sudah mulai melakukan perlawanan terhadap perampasan hak adat yang mereka miliki, oleh pihak swasta pemilik izin pengelolaan Hutan Tanaman Industri. Secara universal masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya, hak-hak tersebut melekat pada diri setiap manusia bahkan membentuk harkat manusia itu sendiri sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR).³

Masyarakat adat yang tinggal berkelompok di kawasan hutan Sumatera, Kalimantan dan Papua, namun hak-hak adat kelompok masyarakat ini tertindas oleh bangsanya sendiri tanpa dapat mempertahankan haknya dari perampasan hak atas tanah kawasan hutan yang merupakan sumber kehidupan masyarakat adat, semenjak pemerintah memberi izin konsesi terhadap perusahaan swasta maupun perusahaan penanaman modal asing. Masalah sosial tersebut berbeda dengan problema-problema lainnya di dalam masyarakat adat karena masalah-masalah sosial tersebut berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat adat. Masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang *immoral*, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak, masalah-masalah sosial tak akan

¹ Moh. Hasbi, Deny Er Iddehan, Burhanuddin, dan Sudirman Shomary, *Lintasan Sejarah Pelalawan dari Pekantua ke Kabupaten Pelalawan*, hlm. 41.

² Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 2.

³ OC. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 49.

mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenal apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.⁴

PT. Nusa Wana Raya tidak mau melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sehingga timbul konflik yang berkepanjangan dan jatuhnya korban di masyarakat adat karena mempertahankan hak-hak atas tanah adat yang mereka miliki turun temurun dirampas dengan cara semena-mena oleh perusahaan. Dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi, hutan adat tidak lagi merupakan hutan negara, hak mengelola dan memanfaatkan ada pada masyarakat adat yang hidup di kawasan hutan tersebut. Pemerintah Pusat memberi izin konsesi kepada perusahaan-perusahaan HPH dan HTI, sehingga konflik bermunculan dan masyarakat adat melakukan perlawanan untuk mempertahankan hak-haknya melalui Pengadilan Negeri Pelalawan dengan putusan majelis hakim Perkara Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Plw yang isi dari amar putusan tersebut, pada dasarnya menolak gugatan petani pemilik kebun kelapa sawit, majelis hakim dalam pertimbangan gugatan yang diajukan oleh masyarakat adat tersebut tidak cermat, tidak teliti dan bukti-bukti tidak menceritakan asal usul kepemilikan tanah perkebunan kawasan hutan milik masyarakat adat dan masyarakat petani pendatang, sehingga gugatan masyarakat melalui Pengadilan Negeri Pelalawan tidak dikabulkan oleh majelis hakim.⁵

Konflik antara masyarakat adat dengan pihak perusahaan yang tinggal dan hidup di kawasan hutan di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan tersebut tidak dapat terhindarkan dan banyak masyarakat adat dan petani pendatang yang ditangkap dan ditahan karena dianggap telah merampas tanah konsesi perusahaan. Sudah sepatutnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus segera mengidentifikasi kawasan hutan yang masuk hutan adat. Masyarakat adat pun segera memetakan wilayah, agar dapat terhindar konflik penguasaan tanah di kawasan hutan. Karena terjadinya pertentangan antara golongan-golongan dalam masyarakat bukan hal baru dalam kebudayaan dan masyarakat tersebut yang menyebabkan perubahan-perubahan. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini seharusnya menjadi pintu masuk rekonsiliasi antara pemerintah dan masyarakat adat. Bersama-sama pemerintah, masyarakat adat memetakan wilayah hutan adat yang selama ini dikaburkan.⁶

Majelis hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan hak-hak adat yang sudah ada semenjak kawasan hutan belum berubah fungsi dan masyarakat adat terlebih dahulu mengelola tanah kawasan hutan secara turun temurun, masyarakat adat sudah memiliki hak dan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sekitar tahun 1997 PT. Nusa Wana Raya diberi hak berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 444/KPTS-II/1997 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Seluas ± 21.870 hektare di Provinsi Riau Daerah Tingkat I.

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, karena kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari kebutuhan akan adanya tanah. Tanah digunakan sebagai tempat pemukiman juga digunakan sebagai sarana untuk mencari sumber kehidupan terutama bagi petani yang sumber kehidupannya dari bertani. Tujuan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk “melindungi segenap anak bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

⁴ Soejono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi revisi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 313.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Perkara Reg Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Plw.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Hutan Adat Bukan Hutan Negara.

sosial, bunyi alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memberikan mandat kepada negara agar pemanfaatan bumi (tanah), air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebesar-besarnya digunakan untuk menciptakan kemakmuran bagi Rakyat Indonesia”⁷. Pada era reformasi sekarang ini kebutuhan tenaga-tenaga terampil di bidang pertanian sangat diperlukan, bagi para petani yang tidak memiliki lahan semakin bertambah pesat dan mendorong mereka melakukan perambahan kawasan hutan khususnya di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan berkembang pesatnya pertumbuhan masyarakat yang tidak seimbang dengan ketersediaan tanah pertanian. Akibat dari pertumbuhan masyarakat yang tidak seimbang banyak masyarakat petani pendatang hijrah ke kawasan hutan di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan untuk membuka tanah pertanian, perkebunan sehingga korban dalam konflik kawasan hutan yang berkaitan dengan pengadaan dan pembebasan tanah untuk kepentingan swasta adalah persoalan yang patut untuk dikaji. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.⁸

Penolakan terhadap pemberlakuan Undang-Undang Kehutanan ini di sampaikan secara terus menerus, oleh kesatuan masyarakat adat maupun masyarakat yang memiliki tanah perkebunan yang berada sekitar kawasan hutan tercermin dengan adanya aksi-aksi pembukaan tanah kawasan hutan dengan cara tradisional. Bagi masyarakat adat yang hidup di sekitar kawasan hutan, lahirnya Undang-Undang Kehutanan adalah malapetaka bagi mereka karena dengan adanya Undang-Undang Kehutanan menimbulkan masalah bagi masyarakat adat, karena mereka tidak bisa lagi membakar kawasan hutan untuk dijadikan tanah pertanian atau perkebunan yang mengekang ruang gerak masyarakat adat ataupun masyarakat petani lainnya, yang datang membuka lahan pertanian di lingkungan masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Keberadaan masyarakat adat dan masyarakat petani pendatang yang hidup berdampingan dalam membuka tanah pertanian dan tanah perkebunan di kawasan hutan, menjadi kurang nyaman dengan adanya Undang-Undang Kehutanan. Berbagai kepentingan yang saling tarik menarik antara kebutuhan akan tanah untuk pertanian dan tanah perkebunan bagi para petani dan semakin pesatnya pertumbuhan industri, sehingga keberadaan perkebunan yang tetap perlu dipertahankan karena banyak menyerap tenaga kerja, penyumbang devisa terhadap negara. Konflik kawasan hutan merupakan persoalan tersendiri yang sangat kompleks, yang dihadapi dan dalam mengemban tugas pengelolaan kawasan hutan. Permasalahan tersebut muncul karena belum semua pihak memahami tentang kedudukan hukum kawasan hutan atau belum mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum agraria kehutanan. Oleh karenanya pemerintah perlu segera memikirkan jalan keluarnya agar dapat terhindar dari konflik yang lebih besar dan dapat mengganggu keamanan dan ketenteraman negara yang dapat menghambat pembangunan daerah pada khususnya dan negara umumnya.

Eksploitasi pembukaan kawasan hutan karena konsesi Hak Penguasaan Hutan itu sangat cepat berkembang pada tahun 1970-an, pemerintah mendapat sumber devisa asing yang mendukung pembangunan nasional pada masa itu. Pertumbuhan yang cepat dalam sektor bisnis mempunyai implikasi besar dalam kerusakan sektor kawasan hutan di Desa Segati, Kecamatan Langgam Provinsi Riau, khususnya hutan produksi, bertambahnya kemiskinan sosial ekonomi masyarakat

⁷ Undang-Undang Dasar 1945.

⁸ Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

adat Desa Segati yang tinggal di sekitar konsesi Hak Penguasaan Hutan (HPH). Konflik sering timbul antara masyarakat dengan perusahaan pemilik konsesi HPH, karena Pemerintah pada masa itu tidak mengakui hak-hak adat masyarakat lokal yang akhirnya pengadilan memenangkan pemilik modal kuat. Kerusakan kawasan hutan dari aktivitas konsesi HPH adalah penyebab utama yang melakukan perubahan fungsi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan sawit. Kehancuran kawasan hutan menunjukkan pada penggantian dalam kualitas kawasan hutan ada banyak faktor yang mendorong kerusakan hutan. Penyebab lain adalah kebakaran hutan sebagai bencana lingkungan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan hutan lestari, karena kebijakan yang dibuat hanya menguntungkan pengusaha konsesi HPH tanaman Hutan Industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit. Berbagai kepentingan yang saling tarik menarik antara kebutuhan akan lahan pertanian bagi para petani dan semakin pesatnya pertumbuhan di bidang industri kertas yang diperlukan sekarang ini karena banyak menyerap tenaga kerja yang merupakan salah satu sumber penghasil devisa bagi negara. Apabila kepentingan tersebut tidak dicarikan jalan keluarnya akan menimbulkan terjadinya permasalahan yang besar bagi keamanan dan ketenteraman negara yang akan merugikan bangsa dan negara, sehingga dapat menghambat kemajuan pembangunan negara pada umumnya.

Setelah dilakukan penelitian oleh komponen masyarakat banyak sekali ditemukan kerusakan lingkungan hidup di kawasan hutan lindung maupun hutan industri yang dikelola oleh pihak perusahaan swasta telah mengakibatkan kerusakan lingkungan karena dikelola tanpa memperhitungkan akibat yang ditimbulkan sehingga hampir di setiap daerah mengalami musibah banjir akibat penggundulan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dan korporasi yang berdampingan dengan kawasan hutan. Untuk mengatur agar lingkungan kawasan hutan tidak bertambah rusak oleh ulah manusia maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁹ Restruksi tata cara pengelolaan fungsi-fungsi manajemen pemerintah daerah dinamakan masalah keorganisasian administrasi dan keuangan, baik secara konseptual maupun praktik manajemen pemerintahan daerah mencakup semua unsur yang terkait dalam pemerintah daerah. Penyeragaman yang dilakukan demi pertimbangan stabilitas keamanan, menutup sementara realitas-realitas perbedaan yang terjadi pada masyarakat yang hidup di kawasan hutan Desa Segati, Kecamatan Langgam Pelalawan Provinsi Riau termasuk perbedaan cara pandang dengan pemerintah.

Sebelum adanya Hutan Tanaman Industri di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, jauh sebelum pihak perusahaan swasta datang sebagai pemilik konsesi sudah ada terlebih dahulu sekelompok masyarakat adat yang hidup dari hutan dengan bercocok tanam dan sebahagian dari masyarakat terbut hidup dari menanam karet dan kemudian masyarakat adat tersebut di hadang pihak perusahaan yang mendapat izin konsesi dari pemerintah pusat untuk menjadikan kawasan hutan tersebut menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan banyak sekali perkebunan masyarakat adat yang dirampas oleh pihak perusahaan. Karena masyarakat adat semakin hari semakin terjepit oleh pihak perusahaan yang membuka hutan dan menjadikannya Hutan Tanaman Industri dan banyak di antara masyarakat adat ini yang menjual lahan perkebunan/pertaniannya kepada masyarakat pendatang. Oleh masyarakat pendatang perkebunan tanaman karet milik masyarakat adat yang dibeli diganti tanamannya dengan menanam kelapa sawit. Karena para petani pendatang ini merasa berhak dan mempunyai dasar hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 yang menyatakan bahwa "Pemakaian

⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

tanah-tanah perkebunan dan hutan yang menurut Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 (LN. 1954-65) jo. Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1956 (LN. 1956-45) harus diselesaikan, dan yang pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini belum diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Darurat tersebut, selanjutnya akan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria setelah mendengar keterangan Menteri Pertanian.”¹⁰

Konsentrasi pemilikan dan penguasaan tanah sejak tahun 1980-an sebagai pemicu terjadinya konflik pertanahan yang berdampak tergesernya petani dan masyarakat kecil dari pemilikan dan penguasaan tanah yang selama ini dikelola dan dirawat oleh masyarakat adat dan masyarakat petani pemilik lahan perkebunan. Masalah pertanahan di kawasan hutan, sangat banyak ditemukan definisinya dalam menentukan definisi yang tepat. “Agraria Kehutanan” telah digunakan dalam Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No. 209/1977 dan 1319/KPTS/UM/6/77 tanggal 10 Juni 1977 tentang Pembentukan Panitia Masalah Agraria Kehutanan.¹¹ Kondisi sumber daya hutan di Desa Segati, Kecamatan Langgam khususnya dan umumnya di kawasan hutan di Indonesia saat ini maupun ke depan harus mampu memberi manfaat secara berkelanjutan terhadap manusia, ekologi, dan ekonomi. Pengetahuan tentang hukum agraria kehutanan khususnya di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau sangat mengharapkan peranan generasi penerus untuk dapat memahami betapa pentingnya kawasan hutan bagi warga masyarakat yang tinggal di sekitar, bagi pembangunan bangsa dan negara. Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan perbuatan manusia. Pengertian perlindungan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.¹²

Usaha pembangunan di bidang hukum menjadi bertambah mendesak sehubungan dengan pembangunan nasional yang dilancarkan di pelbagai sektor kehidupan bangsa. Hal ini terutama di sektor pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi nasional di Negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya berarti merombak pola-pola ekonomi tradisional ke arah perekonomian modern. Dalam menyelenggarakan program pembangunan ekonomi nasional diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian di bidang hukum, oleh karena hukum yang diciptakan dalam kondisi perekonomian tradisional sudah tidak dapat lagi digunakan dengan perkembangan kebutuhan-kebutuhan pengembangan ekonomi modern. Kecuali suasana kehidupan yang telah mengalami perubahan-perubahan dan kebutuhan-kebutuhan nasional yang menuntut penyesuaian-penyesuaian di bidang hukum, kebutuhan lalu lintas hukum internasional di mana negara-negara berkembang turut berperan dan ikut mendorong pembangunan di bidang hukum.¹³

Sehubungan dengan paparan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perubahan fungsi hutan menjadi lahan perkebunan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar kawasan hutan di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan,

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 209 Tahun 1977 dan 1319/KPTS/UM/6/77 tanggal 10 Juni 1977 tentang Pembentukan Panitia Masalah Agraria Kehutanan.

¹² Hadi Setia Tungga, *Undang-Undang Kehutanan Beserta Peraturan Perubahannya*, (Jakarta: Harvarindo, 2006), hlm. 46.

¹³ Soejono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Op.cit.*, hlm. 72.

Provinsi Riau yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 di lakukan oleh PT. Nusa Wana Raya?

2. Bagaimana tata kelola perkebunan sawit dan perkebunan karet oleh masyarakat di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau?
3. Bagaimana penyelesaian konflik tanah kawasan hutan dan alih fungsi menjadi perkebunan menurut putusan perkara Reg Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Plw tanggal 7 Mei 2012.

Metode penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum pada bidang pertanahan mengenai penguasaan tanah kawasan hutan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat korban kasus-kasus pertanahan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan sifat penulisannya adalah deskriptif analitis. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah untuk mengkaji dan menganalisis asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan hukum agraria kehutanan dan hukum nasional yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penulis melakukan penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang menekankan pada langkah-langkah spekulatif, teoritis, dan analisis normatif dan menggunakan metode dogmatik hukum yang didasarkan pada dalil-dalil logika. Penulis juga melakukan penelitian hukum yang menggunakan data primer yang menekankan pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris, kuantitatif.¹⁴ Di dalam penelitian dikenal tiga jenis alat pengumpul data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Bahwa penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan atau bahan pustaka lebih diutamakan dari data primer yaitu bahan hukum normatif yang senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka.¹⁵

PEMBAHASAN

A. Penguasaan Tanah Kawasan Hutan Oleh Negara

Masalah tanah dan masyarakat mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan, terbukti adanya hak kepunyaan bersama atas tanah yang ada di wilayah hukumnya, sedangkan dalam aspek hukum publik berupa kewenangan untuk mengatur penguasaan dan peruntukan penggunaan tanah. Hubungan yang meliputi kedua bidang hukum itu disebut hak ulayat (*beschikingsrecht*).¹⁶ Perwujudan ke dalam hak ulayat itu adalah pemanfaatan tanah yang ditujukan pada pemenuhan kebutuhan warga masyarakat, sedangkan keluar melarang orang asing memanfaatkan tanah milik bersama tersebut, kecuali seizin masyarakat atau persekutuan tersebut. Desa Segati di Kabupaten Pelalawan dapat digolongkan sebagai persekutuan hukum yang dapat menjadi objek hak milik bersama dengan sebutan hak milik adat. Eksistensi dari tanah adat ini pernah berlaku di Indonesia berbeda-beda kurun waktunya, sejak pada masa zaman kolonial Belanda, berdasarkan ketentuan Pasal 7 *Agrarische Wet* 1870, tanah adat ini diakui hanya sebagai hak pakai atas tanah negara (dalam administrasi pertanahan dicatat sebagai *onvrij lands domein* = tanah negara tidak bebas), sedangkan hak ulayat sama sekali tidak mendapat pengakuan (dalam administrasi pertanahan dicatat sebagai *vrij lands domein* = tanah negara bebas). Salah satu peraturan pelaksana dari undang-undang itu

¹⁴ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Medan: Sofmedia, 2015), hlm. 27.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 66.

¹⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, cet. ketiga (Jakarta: Djambatan, 1994), hlm. 162.

adalah *Agrarische Besluit* 1870-118. Pasal 1 yaitu bidang tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan kepemilikannya dianggap domein (milik) negara.¹⁷

Menurut Harold. J. Laski, Mac Iver, Soehino dan Mariam Budiharjo, negara memiliki sifat memaksa, monopoli dan mencakup semuanya. Berdasarkan kerangka teori inilah negara Indonesia telah memonopoli dalam penguasaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta ruang angkasa, termasuk di dalamnya tentang penguasaan dan pengusahaan atas tanah kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

Konsep hak bersama atas tanah, di Indonesia dikenal adanya hak ulayat, yang diangkat dalam Pasal 3 UUPA. Namun demikian UUPA dipandang ragu-ragu mengambil sikap terhadap hak ulayat dan hal ini tergambarkan dalam Penjelasan Umum UUPA angka II butir 3. Kemudian terbit Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang mencoba untuk memberikan rambu-rambu eksistensi hak ulayat. Namun demikian, persepsi tentang hak ulayat itu tidak selalu sejalan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari ketentuan yang bersumber pada UUPA dan UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan terkait dengan hak ulayat. Perbedaan persepsi tersebut dapat menimbulkan permasalahan.¹⁸

Untuk menjamin kepastian hak dan kepastian hukum apabila tanah sudah dikuasai oleh masyarakat atau badan hukum pemerintah, swasta dan sosial yang waktunya cukup lama dan tidak ada sanggahan dari pihak lain, berarti tanah itu sudah menjadi tanah negara bebas. Oleh karena itu diperlukan pembuktian tertulis yang diketahui oleh Kepala Desa, dan Camat setempat, sehingga dapat merupakan salah satu alat bukti kepastian hak. Kenyataan yang terjadi di Desa Segati, Kecamatan Langgam adalah sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi konflik yang berlangsung hingga sekarang adalah dilatar belakangi dengan terbitnya Izin Usaha Pemanfaatan Hutan-Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi (sementara) PT. Nusa Wana Raya SELUAS 21.870 hektare di Provinsi Daerah TK. I Riau, telah menimbulkan penderitaan lahir batin bagi masyarakat di Desa Segati, Kecamatan Langgam, karena Perusahaan dengan serta merta hadir dan merampas harta milik masyarakat yang jauh sebelum terbitnya izin kelola milik PT. Nusa Wana Raya sudah tinggal hidup secara berkelompok dan menguasai kawasan hutan secara turun temurun, hal tersebut tidak menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam memberikan izin kelola kepada PT Nusa Wana Raya sehingga konflik penguasaan lahan tidak dapat terhindarkan hingga jatuh korban, namun masyarakat yang sangat terbatas pengetahuan di bidang hukum kepemilikan hak selalu menjadi pihak yang lemah.

Jika dihubungkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 444/KPTS-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Areal Hutan Seluas 21.870 hektare di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT. Nusa Wana Raya. Banyak penyimpangan yang dilakukan perusahaan dalam penguasaan lahan kawasan hutan tersebut. Dalam keputusan tersebut pihak penguasa dan pemerintah telah memberi petunjuk pelaksanaan izin namun pihak perusahaan mengabaikannya sehingga terjadi konflik dengan masyarakat, dan berdasarkan izin tersebut aparat kepolisian dengan arogan menangkap masyarakat yang mendapat laporan dari pihak perusahaan, tanpa mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya konflik dengan masyarakat di Desa Segati yang mempertahankan haknya. Perusahaan juga telah mengesampingkan

¹⁷ I. Ketut Oka Setiawan, *Dinamika Perubahan Hak Penguasaan Atas Tanah Adat Dan Akibatnya Terhadap Peranan Desa*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2002), hlm. 1.

¹⁸ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Buku Kompas, 2008), hlm. 7.

syarat-syarat yang diberikan pemerintah dalam menerbitkan izin yaitu pada poin 14 memerintahkan:

“Wajib memberikan izin kepada masyarakat hukum adat/masyarakat tradisional dan anggota-anggotanya untuk berada di dalam areal kerjanya untuk memungut, mengambil, mengumpulkan, dan mengangkut hasil hutan ikutan seperti rotan, sagu, madu, damar, buah-buahan, getah-getahan, rumput-rumputan, bambu, kulit kayu dan lain sebagainya sepanjang hasil hutan ikutan tersebut untuk menunjang kehidupan sehari-hari.”¹⁹

Dengan demikian politik pertanahan seharusnya dapat melindungi dan dapat menyejahterakan warga masyarakat yang menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu kebijakan pertanahan senantiasa diarahkan meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak masyarakat setempat termasuk hak ulayat yang merupakan hak adat masyarakat serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang dalam peraturan perundang-undangan. Tata kelola tanah pada dasarnya adalah tentang menentukan dan menerapkan kebijakan tanah yang berkelanjutan. Kebijakan pertanahan dilandasi pada kewenangan negara untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUPA:

- (1) Mengatur persediaan, penggunaan, peruntukan dan pemeliharaan bumi air dan ruang angkasa;
- (2) Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang mengenai bumi, air dan ruang angkasa dan;
- (3) Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi air dan ruang angkasa.²⁰

Untuk menertibkan tata kelola kawasan hutan, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1977 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk mengatur masyarakat dalam mengelola kawasan hutan dan hutan yang telah berubah fungsi menjadi perkebunan agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup hutan lindung serta tidak mengganggu makhluk hidup lainnya yang tinggal dan hidup di dalam kawasan hutan tersebut. Kebijakan pemerintah senantiasa diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat termasuk hak ulayat serta masyarakat adat berdasarkan tata ruang yang seimbang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Peranan Hukum Dalam Proses Pembangunan

Bila diteliti, semua lapisan masyarakat yang sedang membangun merupakan ciri khas adalah perubahan bagaimanapun kita mendefinisikan pembangunan itu, yang menjadi tolak ukur yang kita pergunakan bagi masyarakat dalam pembangunan. Peranan hukum dalam pembangunan adalah menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara teratur. Bahwa perubahan yang teratur adalah dikarenakan penerapan perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau merupakan kombinasi kedua-duanya. Perubahan yang teratur melalui prosedur hukum, baik yang berwujud perundang-undangan atau keputusan badan peradilan lebih baik dari pada perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata. Karena perubahan maupun ketertiban

¹⁹ Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 444/KPTS-II/1997 tentang Pemberian Hak Penguasaan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas 21.870 hektare di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Nusa Wana Raya.

²⁰ Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012), hlm. 20.

merupakan tujuan seluruh lapisan masyarakat yang sedang membangun, hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.

Pemberian izin dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 444/KPTS-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Areal Hutan Seluas 21.870 hektare di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT. Nusa Wana Raya. Banyak penyimpangan yang dilakukan perusahaan dalam penguasaan lahan kawasan hutan tersebut. Karena pihak Perusahaan telah mengabaikan peraturan perundang-undangan sehingga terjadilah konflik dengan masyarakat dalam pengelolaan dan penguasaan lahan kawasan hutan di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan tersebut yang sudah berlangsung sejak kehadiran PT. Nusa Wana Raya di Desa tersebut. Kegagalan dari hukum dan ahli-ahli hukum untuk memainkan peranan dalam proses pembangunan ekonomi dan kekecewaan masyarakat terhadap hukum dan para ahli hukum yang kemudian timbul karena cara berpikir dan bertindak para penegak hukum dan para ahli hukum yang tradisional yang tidak siap untuk menghadapi perkembangan masyarakat yang sangat pesat di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Secara praktis suatu hal pertama yang harus dipikirkan dalam melakukan usaha pembinaan hukum adalah untuk menetapkan bidang-bidang hukum mana yang dapat diperbaharui dan bidang-bidang hukum mana yang sebaiknya diterapkan kepada masyarakat terlebih dahulu.

Di samping hal-hal tersebut maka perlu diperhatikan bahwa hubungan hukum dan penguasaan lahan kawasan hutan yang dimohonkan untuk kepentingan PT. Nusa Wana Raya hendaklah disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada (Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 1 Tahun 1994), mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Kiranya jelas bahwa dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum, diperlukannya adanya transparansi mengenai rencana tata ruang maupun rencana pengadaan lahan konsesi. Dengan adanya transparansi, maka masyarakat dapat mempersiapkan dirinya secara lebih baik agar dapat mencegah terjadinya penguasaan lahan tanah secara liar dengan berbagai akibat hukum yang timbul. Dan dapat terhindar dari konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan pemilik izin kelola kawasan hutan dan hutan yang akan dijadikan lokasi Hutan Tanaman Industri ataupun yang berkelanjutan.

C. Penggunaan Tanah Kawasan Hutan Oleh PT. Nusa Wana Raya di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan, yang bersumber dari UUD 1945 dan merupakan produk-produk hukum zaman kolonial antara lain Undang-Undang Hutan untuk Jawa dan Madura 1927 (*Boos Ordonatie*) dan peraturan kehutanan (*Boos Verordening*). Beberapa substansi muatan UUPK masih perlu dipertahankan dengan diperluas antara lain adalah Pasal 33 yang berbunyi bahwa perekonomian disusun sebagai usaha-usaha bersama berdasar asas kekeluargaan ayat (1), yang paling penting bagi Negara adalah menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara ayat (2) dan hutan dikuasai oleh negara yang diperuntukkan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat ayat (3). Penjabaran Pasal 33 UUD 1945 ke dalam UUPK terdapat dalam Pasal 5, 6, 9, 13 dan Pasal 14 UUPK. Dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 5 maka pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan kekayaan alam yang berupa hutan sebagaimana dilihat pada Pasal 8, 9, 13 dan 14 UUPK.

Untuk menjamin pemanfaatan hutan setinggi-tingginya dan secara serba guna, maka pemerintah dalam rangka perencanaan penggunaan tanah membuat suatu rencana umum mengenai

peruntukan, penyediaan, pengadaan dan penggunaan dari semua hutan di wilayah Republik Indonesia yang meliputi bidang-bidang tersebut pada Pasal 6 yakni:

1. Pengaturan tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah;
2. Produksi hasil hutan dan pemasarannya guna memenuhi kepentingan masyarakat pada umumnya dan khususnya guna keperluan pembangunan, industri serta ekspor;
3. Sumber mata pencaharian yang bermacam-macam ragam bagi rakyat di dalam dan sekitar hutan;
4. Perlindungan alam hayati dan has guna kepentingan ilmu pengetahuan kebudayaan, pertanian nasional, rekreasi dan pariwisata;
5. Transmigrasi, pertanian, perkebunan dan peternakan; dan
6. Lain-lain yang bermanfaat bagi umum.

Untuk mencapai hutan sebaik serta seluas mungkin secara tepat guna dan terus menerus baik langsung maupun tidak langsung ditetapkan dalam Pasal 9:

1. Pengurusan hutan bertujuan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya secara tepat guna dan lestari, baik langsung maupun tidak langsung dalam usaha membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, didasarkan atas rencana umum dan rencana karya tersebut pada Pasal 6 dan 8.
2. Kegiatan Pengurusan hutan tersebut pada ayat (1) meliputi:
 - a) Mengatur dan melaksanakan perlindungan, penguatan, penataan, pembinaan dan pengusahaan hutan serta penghijauan;
 - b) Pengurusan hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata serta membina margasatwa dan pemburuan;
 - c) Menyelenggarakan inventarisasi hutan;
 - d) Melaksanakan penelitian tentang hutan dan hasil hutan serta guna dan manfaatnya serta penelitian sosial ekonomi dari rakyat yang hidup di dalam dan sekitar hutan; dan
 - e) Mengatur serta menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan dalam bidang kehutanan.

Pengusahaan hutan dilakukan sedemikian rupa sehingga dari satu kelompok hutan seluas-luasnya dan secara terus menerus dengan jalan mengadakan penanaman kembali, menyelenggarakan pembukaan wilayah bangunan-bangunan dan lain-lain usaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 UUPK. Guna lebih melancarkan jalannya perusahaan dan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur seharusnya pengusahaan hutan dilakukan menurut asas perusahaan dengan mengutamakan kebutuhan rakyat serta ketenteraman dan kesenangan kerja dalam masyarakat. Pasal 14 merupakan penjabaran dari Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, sebagaimana tertuang dalam Konsiderans “menimbang” PP No. 33 Tahun 1970 butir (a) bahwa untuk menjamin diperolehnya manfaat yang seluas-luasnya dari hutan yang meliputi peruntukan, penyediaan, pengadaan dan penggunaan hutan.

Kenyataannya pembukaan lahan kawasan hutan menjadi Hutan Tanam Industri merupakan salah satu faktor terjadinya kerusakan hutan dan lingkungan hidup yang telah menyebabkan terjadinya banjir yang menimbulkan penderitaan bagi masyarakat dan makhluk hidup yang tinggal di kawasan hutan tersebut. Pengelolaan lahan kawasan hutan di Desa Segati telah menyebabkan

kerugian bagi Negara khususnya masyarakat yang hidup dan tinggal di kawasan hutan, karena pihak perusahaan dalam membuka kawasan hutan dengan cara membakar dan menebang kayu secara semerawut dan merampas lahan milik masyarakat yang telah terlebih dahulu menguasai kawasan hutan tersebut. Maka untuk menata pedesaan pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedesaan yang bertujuan agar Kepala Desa yang berdampingan dengan kawasan hutan untuk tidak mudah memberi izin mengelola lahan di kawasan hutan yang berguna untuk kepentingan generasi yang akan datang dan demi terjaganya ekosistem dan lingkungan hidup dapat tertata dengan baik. Prosedur pelaksanaan izin kelola yang dimiliki oleh PT. Nusa Wana Raya berbeda pelaksanaannya dan salah satunya ketidakadanya terdapat masyarakat transmigrasi di Desa Segati hingga sekarang ini dan penguasaan lahan tanpa adanya musyawarah dan anti rugi tetapi masyarakat dipaksa untuk meninggalkan lahan miliknya.²¹

PENUTUP

Sebab terjadinya perubahan fungsi hutan menjadi tanah perkebunan adalah karena budaya masyarakat adat yang masih sangat kental dan lebih taat kepada peraturan adat dari pada peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah. Karena masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan masih sangat rendah pengetahuannya dan tertutup sikapnya atas kemajuan zaman. Masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan di Desa Segati lebih taat atas perintah ketua adat pada kelompoknya dan sebagian besar masyarakat adat di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan berpendidikan rendah, dan hidup dari hasil hutan tempat mereka tinggal. Peningkatan produksi yang berorientasi pada perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan nilai tambah, efisiensi usaha dalam pendapatan peningkatan pendapatan petani, sehingga Pemerintah Pusat dalam memberikan izin kelola kepada pihak PT. Nusa Wana Raya dengan tidak mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat yang hidup di kawasan hutan di Desa Segati secara berkelompok. Sehingga mengakibatkan konflik yang berkepanjangan karena adanya ketimpangan ekonomi, sosial, budaya antara masyarakat adat dengan masyarakat petani pendatang yang memiliki pengetahuan dibandingkan dengan masyarakat adat yang berusaha mempertahankan kawasan hutan tempat mereka tinggal, secara *de facto* Pihak PT. Nusa Wana Raya telah memiliki izin kelola dari Pemerintah dan masyarakat adat tidak memiliki dokumen atas kepemilikan perkebunan milik masyarakat adat.

Pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam jiwa Pancasila dan UUD 1945 untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Pembangunan jangka panjang ialah terciptanya struktur ekonomi yang seimbang dengan menciptakan kekuatan pertanian yang tangguh yang mendukung sektor industri. Pembangunan bangsa yang terus menerus dan berkesinambungan serta tuntutan akan sektor pertanian dimasa datang maka sasaran pembangunan pertanian mempersiapkan sektor pertanian yang tangguh serta menunjang pembangunan nasional. Tata kelola perkebunan sawit dan karet milik masyarakat sangat tidak memenuhi standar perkebunan. Karena dalam bercocok tanam kelapa sawit ataupun karet, masyarakat tidak mempunyai pengetahuan sebagai petani kelapa sawit dan kebun karet yang menyebabkan hasil panen dari perkebunan masyarakat tidak mampu bersaing mutu dan harganya dengan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan yang sudah menggunakan metode pertanian modern, sehingga menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat adat yang

²¹ Wawancara dengan tokoh-tokoh Masyarakat Desa Segati yang merupakan Pemangku adat Petalangan Batin Mudo Langkan Desa Segati Mei 2015.

menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat adat/petani lokal dengan pihak perusahaan yang menggunakan metode dalam pertanian dan mengakibatkan hasil dari perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet milik masyarakat tidak mampu bersaing harga di pasaran karena mutu hasil perkebunan milik masyarakat jauh lebih rendah harganya dari pada harga hasil perkebunan milik perusahaan. Kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dalam pemberian izin kepada pihak swasta/investor seringkali tanpa adanya penelitian yang lebih mendalam dan hati-hati agar masyarakat tidak menjadi korban dalam hal pembangunan ekonomi nasional. Landasan hukum terjadinya penguasaan lahan kawasan hutan di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 yang memberikan kepastian hukum di bidang Pertanahan khususnya kepada PT. Nusa Wana Raya dalam melaksanakan penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPA. Kemudian dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah sangat kurang efektif dalam penerapan dan pelaksanaannya dan adanya pembiaran oleh aparat pemerintah sehingga konflik perebutan lahan tidak dapat terhindarkan.

Penyelesaian konflik tanah kawasan hutan dan alih fungsi menjadi perkebunan menurut putusan Pengadilan Negeri Pelalawan telah menyebabkan terjadinya konflik penguasaan lahan tanah kawasan hutan dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara memenangkan pihak Perusahaan dengan dasar kepemilikan adalah izin kelola yang dimiliki pihak perusahaan, sebagian dari masyarakat adat dalam mengelola tanah pertanian yang sudah turun-temurun sedangkan pihak perusahaan hanya berdasarkan izin kelola yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Sehingga pihak majelis hakim pengadilan tidak mampu memberi pertimbangan asal-mulanya kepemilikan tanah di kawasan hutan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga pihak masyarakat kalah melawan pihak perusahaan pemilik izin kelola tersebut. Dengan adanya Keputusan MK No. 35/PUU-X/2012 menyatakan Penguasaan dan Penetapan Hukum Adat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, Penguasaan Negara atas hutan dalam mengatur dan mengurus hutan, Negara menempatkan hutan adat yang digolongkan menjadi bagian hutan Negara mengakibatkan masyarakat hukum adat sering kali konflik baik antara pemerintah maupun dengan hukum dalam mempertahankan wilayah yang dianggap sebagai wilayah adat dari masyarakat adat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 hutan adat dikeluarkan dari hutan Negara, namun tetap dalam penguasaan Negara. Dalam hal ini sangat jelas hubungan hukum yang merancang Undang-undang Agraria menganut dualisme hukum dalam kebijakan pertanahan. Penguasaan oleh Negara tercantum di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 kemudian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria banyak mengalami hambatan secara politis, sosial dan ekonomis. Sebagai jalan keluar diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah berdasarkan Pasal 6 UUPA memberikan jaminan kepastian hukum yang merupakan sumber hukum “Asas Fungsi Sosial Tanah.”

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ediwarman. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Medan: Sofmedia. 2015.

- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya*. cet. ketiga. Jakarta: Djambatan. 1994.
- Kaligis, OC., *Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: Alumni. 2006.
- Limbong, Bernhard. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka. 2012.
- Moh. Hasbi, Deny Er Iddehan, Burhanuddin, dan Sudirman Shomary. *Lintasan Sejarah Pelalawan dari Pekantua ke Kabupaten Pelalawan*.
- Setiawan, I. Ketut Oka. *Dinamika Perubahan Hak Penguasaan Atas Tanah Adat dan Akibatnya Terhadap Peranan Desa*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2002.
- Soekanto, Soerjono. dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. edisi revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986.
- Sumardjono, Maria S.W., *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Buku Kompas. 2008.
- Tungga, Hadi Setia. *Undang-Undang Kehutanan Beserta Peraturan Perubahannya*. Jakarta: Harvarindo. 2006.
- Zain, Alam Setia. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Perkara Reg Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Plw.

Putuskan Mahkamah Konstitusi Hutan Adat Bukan Hutan Negara.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 209 Tahun 1977 dan 1319/KPTS/UM/6/77 tanggal 10 Juni 1977 tentang Pembentukan Panitia Masalah Agraria Kehutanan.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 444/KPTS-II/1997 tentang Pemberian Hak Penguasaan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas 21.870 hektare di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Nusa Wana Raya.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Wawancara

Wawancara dengan tokoh-tokoh Masyarakat Desa Segati yang merupakan Pemangku adat Petalangan Batin Mudo Langkan Desa Segati Mei 2015.